



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...



6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyeempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

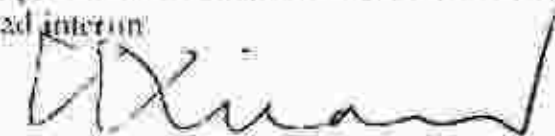
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.**
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim


SAADILLAH MURSIID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kotya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515 A TAHUN 1985
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH**

A. PEMBUKAAN MADRASAH				
KOD. PROVINS	KOD. KABUPATEN	KOD. KOTA	KOD. KECAMATAN	NAMA MADRASAH
01 ACEH	1	1	1	A. MADRASAH IBTIDAIYAH
				1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kuala Oie
				Kab Aceh Utara
				2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cot Mautik
				Kab Aceh Utara
				3. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gure Bara
				Kab Aceh Utara
				4. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Kaya
				Kab Aceh Utara
				5. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Uluh Gubun
				Kab Aceh Utara
				6. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kaurun
				Kab Aceh Utara
				7. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Riko
				Kab Aceh Utara
				8. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banting Baru
				Kab Aceh Utara
				9. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kumpang Ane
				Kab Aceh Utara

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	NAMA MELAKSIKAN	KABUPATEN	PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6	7
XVI	SULAWESI TENGAH	66	3	Mardasah Aliyah Negeri Tarekan	Kab. Bulungan	Mardasah Aliyah Swasta Hanyawira Jl. Jend. Sudirman Tarekan Kec. Tarakan
		67	4	Mardasah Aliyah Negeri Taman Cagorot	Kab. Paser	Mardasah Aliyah Swasta As. Aliyah Jl. Paser Biringkang Kec. Taman Cagorot
		68	5	Mardasah Aliyah Negeri Bontang	Kab. Bontang	Mardasah Aliyah Swasta As. Aliyah Drs. Bontang Kec. Bontang Utara
		69	1	Mardasah Aliyah Negeri Tamar	Kab. Danggala	Mardasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Jl. Medan No 3 Kota Pangs Kec. Tamar
		70	1	Mardasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Muria	Mardasah Aliyah Swasta Al - Khas Raha Jl. Oporogoro Raha Ke Raha III Kec. Kota Baru
XVIII	BALI	71	2	Mardasah Aliyah Negeri Wido	Kab. Kusaka	Mardasah Aliyah Swasta Aliyah Wido Jl. Pandikan No 4 Di Wido Kecamatan Wido
		72	1	Mardasah Aliyah Negeri Antemura	Kab. Karangasem	Mardasah Aliyah Swasta Nurul Widi Jl. Ujung Surapati Antemura
XIX	JAWA BARAT	73	1	Mardasah Aliyah Negeri 2 Piyu	Kab. Lombok Tengah	Mardasah Aliyah Swasta Dana Jember Kec. Jember
		74	1	Mardasah Aliyah Negeri Rongasengkok	Kab. Karangasem	Mardasah Aliyah Swasta Rongasengkok Jl. Bontang Tugu 1 Di Rongasengkok Selatan Kec. Rongasengkok



 SAODIYAH MURSIJO



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 17 (Tujuh Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 24 (Dua Puluh Empat) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

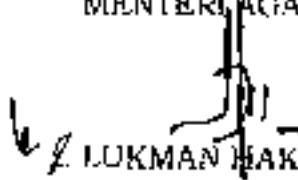
KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


/ LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 389 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 17 (TUJUH BELAS)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MAN 1 (Model) Tanjung Karang	MAN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MAN 2 Tanjung Karang	MAN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MAN 2 Metro	MAN 1 Metro
4	Lampung	MAN Kalianda	MAN 1 Lampung Selatan
5	Lampung	MAN Puncowati	MAN 1 Lampung Tengah
6	Lampung	MAN Kotabumi	MAN 1 Lampung Utara
7	Lampung	MAN Padangratu	MAN 2 Lampung Utara
8	Lampung	MAN Krui	MAN 1 Pesisir Barat
9	Lampung	MAN Liwa	MAN 1 Lampung Barat
10	Lampung	MAN Kotaagung	MAN 1 Tanggamus
11	Lampung	MAN 1 Metro	MAN 1 Lampung Timur
12	Lampung	MAN Banjarnegara	MAN 1 Way Kanan
13	Lampung	MAN Kedondong	MAN 1 Pesawaran
14	Lampung	MAN Pringsewu	MAN 1 Pringsewu
15	Lampung	MAN Mulyakencana	MAN 1 Tulang Bawang Barat
16	Lampung	MAN Kilang Budi Jaya	MAN 2 Tulang Bawang Barat
17	Lampung	MAN Simpang Pematang	MAN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 369 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
 TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 24 (DUA PULUH EMPAT)
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MTsN 1 Tanjungkarang	MTsN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MTsN 2 Tanjungkarang	MTsN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MTsN Kalianda	MTsN 1 Lampung Selatan
4	Lampung	MTsN Palas	MTsN 2 Lampung Selatan
5	Lampung	MTsN Sidoharjo	MTsN 3 Lampung Selatan
6	Lampung	MTsN Banjarsari	MTsN 4 Lampung Selatan
7	Lampung	MTsN Poncowati	MTsN 1 Lampung Tengah
8	Lampung	MTsN Bandar Surabaya	MTsN 2 Lampung Tengah
9	Lampung	MTsN 1 Kotabumi	MTsN 1 Lampung Tengah
10	Lampung	MTsN 2 Kotabumi	MTsN 2 Lampung Tengah
11	Lampung	MTsN Padang Ratu	MTsN 3 Lampung Tengah
12	Lampung	MTsN Liwa	MTsN 1 Lampung Barat
13	Lampung	MTsN Menggala	MTsN Tulang Bawang
14	Lampung	MTsN Kotaagung	MTsN 1 Tanggamus
15	Lampung	MTsN Model Talangpadang	MTsN 2 Tanggamus
16	Lampung	MTsN Metro Batanghari	MTsN 1 Lampung Timur
17	Lampung	MTsN Raman Utara	MTsN 2 Lampung Timur
18	Lampung	MTsN Kasui	MTsN 1 Way Kanan
19	Lampung	MTsN Scrupa Indah	MTsN 2 Way Kanan
20	Lampung	MTsN Kedondong	MTsN 1 Pesawaran
21	Lampung	MTsN Gunungrejo	MTsN 2 Pesawaran

22. Lampung ...

22	Lampung	MTsN Pringsewu	MTsN 1 Pringsewu
23	Lampung	MTsN Sukoharjo	MTsN 2 Pringsewu
24	Lampung	MTsN Seri Tanjung Mesuji	MTsN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 49 (EMPAT PULUH SEMBILAN)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MIN 1 Tanjung Karang	MIN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MIN 1 Teluk Betung	MIN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MIN Tanjung Agung	MIN 3 Bandar Lampung
4	Lampung	MIN Sawah Brebes	MIN 4 Bandar Lampung
5	Lampung	MIN Sukarame	MIN 5 Bandar Lampung
6	Lampung	MIN Way Halim	MIN 6 Bandar Lampung
7	Lampung	MIN Jagabaya II	MIN 7 Bandar Lampung
8	Lampung	MIN Panjang	MIN 8 Bandar Lampung
9	Lampung	MIN Sukajawa	MIN 9 Bandar Lampung
10	Lampung	MIN Kota Baru	MIN 10 Bandar Lampung
11	Lampung	MIN Sinar Semendo	MIN 11 Bandar Lampung
12	Lampung	MIN Garuntang	MIN 12 Bandar Lampung
13	Lampung	MIN Model Kalianda	MIN 1 Lampung Selatan
14	Lampung	MIN Sukanegara Tanjung Bintang	MIN 2 Lampung Selatan
15	Lampung	MIN Srimulyo Natar	MIN 3 Lampung Selatan
16	Lampung	MIN Sidomulyo	MIN 4 Lampung Selatan
17	Lampung	MIN Rajabasa	MIN 5 Lampung Selatan
18	Lampung	MIN Ulum Sukamaju	MIN 6 Lampung Selatan

19. Lampung . .

19	Lampung	MIN 1 Kotabumi	MIN 1 Lampung Utara
20	Lampung	MIN 2 Kotabumi	MIN 2 Lampung Utara
21	Lampung	MIN 3 Kotabumi	MIN 3 Lampung Utara
22	Lampung	MIN 4 Kotabumi	MIN 4 Lampung Utara
23	Lampung	MIN Blambangan Pagar	MIN 5 Lampung Utara
24	Lampung	MIN Padang Ratu	MIN 6 Lampung Utara
25	Lampung	MIN Bernah	MIN 7 Lampung Utara
26	Lampung	MIN 1 Kria	MIN 1 Pesisir Barat
27	Lampung	MIN 2 Tanjung Raya	MIN 1 Lampung Barat
28	Lampung	MIN 3 Watas	MIN 2 Lampung Barat
29	Lampung	MIN Hujung	MIN 3 Lampung Barat
30	Lampung	MIN Menggala	MIN 1 Tulang Bawang
31	Lampung	MIN Pasar Batang	MIN 2 Tulang Bawang
32	Lampung	MIN Kotaagung	MIN 1 Tanggamus
33	Lampung	MIN Purwodadi	MIN 2 Tanggamus
34	Lampung	MIN Adirejo	MIN 1 Lampung Timur
35	Lampung	MIN Sukadana	MIN 2 Lampung Timur
36	Lampung	MIN Gunung Terang	MIN 3 Lampung Timur
37	Lampung	MIN Braja Sakti	MIN 4 Lampung Timur
38	Lampung	MIN Blambangan Umpu	MIN 1 Way Kanan
39	Lampung	MIN Simpang Asam	MIN 2 Way Kanan
40	Lampung	MIN Tegal Mukti	MIN 3 Way Kanan
41	Lampung	MIN Sritunggal	MIN 4 Way Kanan
42	Lampung	MIN Model Pasar Baru	MIN 1 Pesawaran
43	Lampung	MIN Negara Saka	MIN 2 Pesawaran
44	Lampung	MIN Pringsewu	MIN 1 Pringsewu
45	Lampung	MIN Model Bandungbaru	MIN 2 Pringsewu
46	Lampung	MIN Guraikmas	MIN 3 Pringsewu

47. Lampung ...

47	Lampung	MIN Pamenang	MIN 4 Pringsewu
48	Lampung	MIN Brebes	MIN 1 Tulang Bawang Barat
49	Lampung	MIN Mukti Karya	MIN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

